



**BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BRASTAGI UJUNG GADING,
PEMERINTAHAN NAGARI TAMPUS DAMAI UJUNG GADING, PEMERINTAHAN
NAGARI TALUAK AMBUN UJUNG GADING, PEMERINTAHAN NAGARI KOTO
GUNUNG UJUNG GADING, PEMERINTAHAN NAGARI KOTO SAWAH UJUNG
GADING, PEMERINTAHAN NAGARI SALIDO SAROHA UJUNG GADING,
PEMERINTAHAN NAGARI KUAMANG ALAI UJUNG GADING
DAN PEMERINTAHAN NAGARI SITUAK UJUNG GADING
DI KECAMATAN LEMBAH MELINTANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola nagari dan meningkatkan daya saing nagari perlu dilakukan pembentukan nagari melalui pemekaran nagari;
 - b. bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud huruf a adalah dalam rangka merealisasikan kehidupan masyarakat yang sejahtera;
 - c. bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa dan Ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari, perlu dilakukan Pemekaran Nagari Ujung Gading di Kecamatan Lembah Melintang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Pemerintahan

Nagari Brastagi Ujung Gading, Pemerintahan Nagari Tampun Damai Ujung Gading, Pemerintahan Nagari Taluak Ambun Ujung Gading, Pemerintahan Nagari Koto Gunung Ujung Gading, Pemerintahan Nagari Koto Sawah Ujung Gading, Pemerintahan Nagari Salido Saroha Ujung Gading, Pemerintahan Nagari Kunamang Alai Ujung Gading, dan Pemerintahan Nagari Situak Ujung Gading di Kecamatan Lembah Melintang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT

dan

BUPATI PASAMAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BRASTAGI UJUNG GADING, PEMERINTAHAN NAGARI TAMPUS DAMAI UJUNG GADING, PEMERINTAHAN NAGARI TALUAK AMBUN UJUNG GADING, PEMERINTAHAN NAGARI KOTO GUNUNG UJUNG GADING, PEMERINTAHAN NAGARI KOTO SAWAH UJUNG GADING, PEMERINTAHAN NAGARI SALIDO SAROHA UJUNG GADING, PEMERINTAHAN NAGARI KUAMANG ALAI UJUNG GADING DAN PEMERINTAHAN NAGARI SITUAK UJUNG GADING DI KECAMATAN LEMBAH MELINTANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Desa selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Nagari.
6. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Wali Nagari adalah Pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Nagari Induk adalah Nagari yang mengalami pemekaran Nagari di Wilayah Kabupaten Pasaman Barat.
9. Pembentukan Pemerintahan Nagari adalah Pembentukan Pemerintahan Nagari dari 1 (satu) Pemerintahan Nagari menjadi 2 (dua) atau lebih Pemerintahan Nagari Baru.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk:
- a. Nagari Brastagi Ujung Gading;
 - b. Nagari Tampus Damai Ujung Gading;
 - c. Nagari Taluak Ambun Ujung Gading;
 - d. Nagari Koto Gunung Ujung Gading;
 - e. Nagari Koto Sawah Ujung Gading;
 - f. Nagari Salido Saroha Ujung Gading;
 - g. Nagari Kuamang Alai Ujung Gading; dan
 - h. Nagari Situak Ujung Gading.
- (2) Nagari Brastagi Ujung Gading, Nagari Tampus Damai Ujung Gading, Nagari Taluak Ambun Ujung Gading, Nagari Koto Gunung Ujung Gading, Nagari Koto Sawah Ujung Gading, Nagari Salido Saroha Ujung Gading, Nagari Kuamang Alai Ujung Gading dan Nagari Situak Ujung Gading sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h berasal dari Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang dengan Kode Nagari 13.12.02.2001.

Bagian Kedua

Nagari Brastagi Ujung Gading

Pasal 3

Nagari Brastagi Ujung Gading sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dengan jumlah penduduk 4.428 jiwa/1.063 KK, berasal dari sebagian Wilayah Nagari Ujung Gading yaitu Jorong Brastagi;

Pasal 4

- (1) Nagari Brastagi Ujung Gading sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Tampus Damai Ujung Gading;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Ujung Gading;

- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Kuamang Alai Ujung Gading, dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Tampus Damai Ujung Gading.
- (2) Peta batas wilayah Nagari Brastagi Ujung Gading sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Brastagi Ujung Gading ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

Luas wilayah Nagari Brastagi Ujung Gading sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah 2,367 KM².

Bagian Ketiga

Nagari Tampus Damai Ujung Gading

Pasal 6

Nagari Tampus Damai Ujung Gading sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dengan jumlah penduduk 4.166 jiwa/1.141 KK, berasal dari sebagian Wilayah Nagari Ujung Gading yang terdiri dari :

- a. Jorong Tampus; dan
- b. Jorong Tanjung Damai.

Pasal 7

- (1) Nagari Tampus Damai Ujung Gading sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Situak Ujung Gading;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Salido Saroha Ujung Gading;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Brastagi Ujung Gading dan Nagari Kuamang Alai Ujung Gading; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Ujung Gading dan Nagari Ranah Malintang Kecamatan Sungai Aur.
- (2) Peta batas wilayah Nagari Tampus Damai Ujung Gading sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

(3) Penetapan dan Penegakan Batas Nagari Tampus Dama Ujung Gading ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Luas wilayah Nagari Tampus Dama Ujung Gading sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah 11,933 KM².

Bagian Keempat

Nagari Taluak Ambun Ujung Gading

Pasal 9

Nagari Taluak Ambun Ujung Gading sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dengan jumlah penduduk 3.720 jiwa/940 KK, berasal dari sebagian Wilayah Nagari Ujung Gading yaitu Jorong Taluak Ambun.

Pasal 10

(1) Nagari Taluak Ambun Ujung Gading sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Ujung Gading;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Koto Sawah Ujung Gading;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Kuamang Alai Ujung Gading;
- dan
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Koto Gunung Ujung Gading.

(2) Peta batas wilayah Nagari Taluak Ambun Ujung Gading sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Penetapan dan Penegakan Batas Nagari Taluak Ambun Ujung Gading ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Luas wilayah Nagari Taluak Ambun Ujung Gading sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) adalah 540 KM².

Bagian Kelima
Nagari Koto Gunung Ujung Gading
Pasal 12

Nagari Koto Gunung Ujung Gading sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf d dengan jumlah penduduk 4.853 jiwa/1.134 KK, berasal dari sebagian Wilayah Nagari Ujung Gading yang terdiri dari :

- a. Jorong Koto Pinang; dan
- b. Jorong Batang Gunung.

Pasal 13

- (1) Nagari Koto Gunung Ujung Gading sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Ujung Gading;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Koto Sawah Ujung Gading;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Taluak Ambun Ujung Gading; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Salido Saroha Ujung Gading dan Nagari Salingka Muaro Kecamatan Sungai Aur.
- (2) Peta batas wilayah Nagari Koto Gunung Ujung Gading sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Koto Gunung Ujung Gading ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

Luas wilayah Nagari Koto Gunung Ujung Gading sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) adalah 21,733 KM².

Bagian Keenam
Nagari Koto Sawah Ujung Gading
Pasal 15

Nagari Koto Sawah Ujung Gading sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dengan jumlah penduduk 5.624 jiwa/1.260 KK, berasal dari sebagian Wilayah Nagari Ujung Gading yaitu Jorong Koto Sawah.

Pasal 16

- (1) Nagari Koto Sawah Ujung Gading sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai batas-batas wilayah administratif sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Taluak Andam Ujung Gading dan Nagari Kuamang Alai Ujung Gading;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Ranah Koto Tinggi Kecamatan Koto Balingka;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Parik Kecamatan Koto Balingka; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Koto Gunung Ujung Gading
- (2) Peta batas wilayah Nagari Koto Sawah Ujung Gading sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penetapan dan Pengawasan Batas Nagari Koto Sawah Ujung Gading ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

Luas wilayah Nagari Koto Sawah Ujung Gading sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) adalah 22,014 KM².

Bagian Ketujuh

Nagari Salido Saroha Ujung Gading

Pasal 18

Nagari Salido Saroha Ujung Gading sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dengan jumlah penduduk 4.888 jiwa/1.201 KK, berasal dari sebagian Wilayah Nagari Ujung Gading yang terdiri dari :

- a. Jorong Ranah Salido; dan
- b. Jorong Saroha.

Pasal 19

- (1) Nagari Salido Saroha Ujung Gading sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Tampus Damai Ujung Gading dan Nagari Ujung Gading;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Salingka Muaro Kecamatan Sungai Aur;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Koto Gunung Ujung Gading; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Salingka Muaro dan Nagari Ranah Mallintang Kecamatan Sungai Aur.
- (2) Peta batas wilayah Nagari Salido Saroha Ujung Gading sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Salido Saroha Ujung Gading ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

Luas wilayah Nagari Salido Saroha Ujung Gading sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) adalah 27,401 KM².

Bagian Kedelapan

Nagari Kuamang Alai Ujung Gading

Pasal 21

Nagari Kuamang Alai Ujung Gading sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g dengan jumlah penduduk 6.724 jiwa/1.550 KK, berasal dari sebagian Wilayah Nagari Ujung Gading yang terdiri dari :

- a. Jorong Kuamang; dan
- b. Jorong Lubuak Alai;

Pasal 22

- (1) Nagari Kuamang Alai Ujung Gading sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Situak Ujung Gading;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Koto Sawah Ujung Gading dan Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka;

- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Ujung Gading, Nagari Tampus Damai Ujung Gading, Nagari Taluak Ambun Ujung Gading dan Nagari Brastagi Ujung Gading.
- (2) Peta batas wilayah Nagari Kuamang Alai Ujung Gading sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Kuamang Alai Ujung Gading ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 23

Luas wilayah Nagari Kuamang Alai Ujung Gading sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) adalah 9,650 KM².

Bagian Kesembilan Nagari Situak Ujung Gading

Pasal 24

Nagari Situak Ujung Gading sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h dengan jumlah penduduk 5.265 jiwa/1.126 KK, berasal dari sebagian Wilayah Nagari Ujung Gading yang terdiri dari :

- a. Jorong Situak; dan
- b. Jorong Situak Barat.

Pasal 25

- (1) Nagari Situak Ujung Gading sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Tampus Damai Ujung Gading dan Nagari Kuamang Alai Ujung Gading;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Parit, Nagari Koto Tengah dan Nagari Pematang Panjang Kecamatan Koto Balingka; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Ranah Malintang Kecamatan Sungai Aur.

- (2) Peta batas wilayah Nagari Situak Ujung Gading sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Situak Ujung Gading ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

Luas wilayah Nagari Situak Ujung Gading sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 163.700 KM².

Pasal 27

Dengan dibentuknya Nagari Brastagi Ujung Gading, Nagari Tampus Damai Ujung Gading, Nagari Taluak Ambun Ujung Gading, Nagari Koto Gunung Ujung Gading, Nagari Koto Sawah Ujung Gading, Nagari Salido Saroha Ujung Gading, Nagari Kuamang Alai Ujung Gading dan Nagari Situak Ujung Gading sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Wilayah Nagari Ujung Gading dikurangi dengan Wilayah Nagari Brastagi Ujung Gading, Nagari Tampus Damai Ujung Gading, Nagari Taluak Ambun Ujung Gading, Nagari Koto Gunung Ujung Gading, Nagari Koto Sawah Ujung Gading, Nagari Salido Saroha Ujung Gading, Nagari Kuamang Alai Ujung Gading dan Nagari Situak Ujung Gading sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 18, Pasal 21, dan Pasal 24.

BAB III

PEMERINTAHAN NAGARI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

Penjabat Wali Nagari dilantik bersamaan dengan diresmikannya Nagari oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 29

Pemerintahan Nagari diselenggarakan oleh Pemerintah Nagari dan BAMUS Nagari.

Bagian Kedua
Kewenangan Nagari

Pasal 30

Kewenangan Nagari Brastagi Ujung Gading, Nagari Tampus Damai Ujung Gading, Nagari Taluak Ambun Ujung Gading, Nagari Koto Gunung Ujung Gading, Nagari Koto Sawah Ujung Gading, Nagari Salido Saroha Ujung Gading, Nagari Kuamang Alai Ujung Gading dan Nagari Situak Ujung Gading sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mencakup:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala nagari;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Badan Permusyawaratan Nagari

Pasal 31

- (1) Dengan dibentuknya Nagari Brastagi Ujung Gading, Nagari Tampus Damai Ujung Gading, Nagari Taluak Ambun Ujung Gading, Nagari Koto Gunung Ujung Gading, Nagari Koto Sawah Ujung Gading, Nagari Salido Saroha Ujung Gading, Nagari Kuamang Alai Ujung Gading dan Nagari Situak Ujung Gading sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), maka dibentuk BAMUS Nagari di Nagari Brastagi Ujung Gading, Nagari Tampus Damai Ujung Gading, Nagari Taluak Ambun Ujung Gading, Nagari Koto Gunung Ujung Gading, Nagari Koto Sawah Ujung Gading, Nagari Salido Saroha Ujung Gading, Nagari Kuamang Alai Ujung Gading dan Nagari Situak Ujung Gading.
- (2) Ketentuan mengenai Pembentukan BAMUS Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penjabat Wali Nagari

Pasal 32

Dengan dibentuknya Nagari Brastagi Ujung Gading, Nagari Tampus Damai Ujung Gading, Nagari Taluak Ambun Ujung Gading, Nagari Koto Gunung Ujung Gading, Nagari Koto Sawah Ujung Gading, Nagari Salido Saroha Ujung Gading, Nagari Kuamang Alai Ujung Gading dan Nagari Situak Ujung Gading, Bupati mengangkat Penjabat Wali Nagari Brastagi Ujung Gading, Penjabat Wali Nagari Tampus Damai Ujung Gading, Penjabat Wali Nagari Taluak Ambun Ujung Gading, Penjabat Wali Nagari Koto Gunung Ujung Gading, Penjabat Wali Nagari Koto Sawah Ujung Gading, Penjabat Wali Nagari Salido Saroha Ujung Gading, Penjabat Wali Nagari Kuamang Alai Ujung Gading dan Penjabat Wali Nagari Situak Ujung Gading sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dilantik bersamaan dengan diresmikannya Nagari oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tugas, wewenang dan kewajiban yang sama dengan Wali Nagari.
- (1) Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan melakukan antara lain :
 - a. Menyelenggarakan Pemerintahan Nagari;
 - b. Membentuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
 - c. Mengangkat Perangkat Nagari;
 - d. Memfasilitasi Pengisian Anggota BAMUS Nagari;
 - e. Membentuk Lembaga Kemasyarakatan; dan
 - f. Memfasilitasi Pemilihan Wali Nagari Serentak.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban serta larangan bagi wali nagari sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari.

Pasal 35

- (1) Perangkat Nagari dan Anggota BAMUS Nagari Ujung Gading yang berdomisili di masing-masing wilayah Nagari Brastagi Ujung Gading, Nagari Tampus Damai Ujung Gading, Nagari Taluak Ambun Ujung Gading, Nagari Koto Gunung Ujung Gading, Nagari Koto Sawah Ujung Gading, Nagari Salido Saroha Ujung Gading, Nagari Kuamang Alai Ujung Gading dan Nagari Situak Ujung Gading, menjadi Perangkat Nagari dan Anggota BAMUS Nagari di Nagari Brastagi Ujung Gading, Nagari Tampus Damai Ujung Gading, Nagari Taluak Ambun Ujung Gading, Nagari Koto Gunung Ujung Gading, Nagari Koto Sawah Ujung Gading, Nagari Salido Saroha Ujung Gading, Nagari Kuamang Alai Ujung Gading dan Nagari Situak Ujung Gading.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai aset Nagari Brastagi Ujung Gading, Nagari Tampus Damai Ujung Gading, Nagari Taluak Ambun Ujung Gading, Nagari Koto Gunung Ujung Gading, Nagari Koto Sawah Ujung Gading, Nagari Salido Saroha Ujung Gading, Nagari Kuamang Alai Ujung Gading dan Nagari Situak Ujung Gading diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Nagari Brastagi Ujung Gading, Nagari Tampus Damai Ujung Gading, Nagari Taluak Ambun Ujung Gading, Nagari Koto Gunung Ujung Gading, Nagari Koto Sawah Ujung Gading, Nagari Salido Saroha Ujung Gading, Nagari Kuamang Alai Ujung Gading dan Nagari Situak Ujung Gading berhak mendapatkan Dana Transfer dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten serta lain-lain pendapatan yang sah sesuai peraturan Perundang-undangan.
- (2) Nagari Ujung Gading mengalokasikan anggaran biaya melalui APB Nagari Ujung Gading untuk menunjang kegiatan pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan pada Nagari Brastagi Ujung Gading, Nagari Tampus Damai Ujung Gading, Nagari Taluak Ambun Ujung Gading, Nagari Koto Gunung Ujung Gading, Nagari Koto Sawah Ujung Gading, Nagari Salido Saroha Ujung Gading, Nagari Kuamang Alai Ujung Gading dan Nagari Situak Ujung Gading minimal sebesar dana yang dialokasikan untuk kegiatan pemerintahan di masing-masing Nagari Persiapan sampai dengan ditetapkannya APB Nagari Brastagi Ujung Gading, APB Nagari Tampus Damai Ujung Gading, APB Nagari Taluak Ambun Ujung Gading, APB Nagari Koto Gunung Ujung Gading, APB Nagari Koto Sawah Ujung Gading, APB Nagari Salido Saroha Ujung Gading,

APB Nagari Kuamang Alai Ujung Gading dan APB Nagari Situak Ujung Gading.

- (3) Biaya Pelantikan Penjabat Wali Nagari dan Peresmian Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 28 dibebankan kepada APB Nagari Ujung Gading.

Pasal 37

Sebelum Pemerintah Nagari Brastagi Ujung Gading, Pemerintah Nagari Tampus Damai Ujung Gading, Pemerintah Nagari Taluak Ambun Ujung Gading, Pemerintah Nagari Koto Gunung Ujung Gading, Pemerintah Nagari Koto Sawah Ujung Gading, Pemerintah Nagari Salido Saroha Ujung Gading, Pemerintah Nagari Kuamang Alai Ujung Gading dan Pemerintah Situak Ujung Gading dapat menetapkan Peraturan Nagari, Peraturan Wali Nagari dan Keputusan Wali Nagari sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Nagari, Peraturan Wali Nagari dan Keputusan Wali Nagari Ujung Gading tetap berlaku dan dilaksanakan di Pemerintah Nagari Brastagi Ujung Gading, Pemerintah Nagari Tampus Damai Ujung Gading, Pemerintah Nagari Taluak Ambun Ujung Gading, Pemerintah Nagari Koto Gunung Ujung Gading, Pemerintah Nagari Koto Sawah Ujung Gading, Pemerintah Nagari Salido Saroha Ujung Gading, Pemerintah Nagari Kuamang Alai Ujung Gading dan Pemerintah Situak Ujung Gading.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Khusus Kerapatan Adat Nagari dan Lembaga Adat Nagari Lainnya, tidak dapat di mekarkan dan/atau dibentuk pada Nagari Brastagi Ujung Gading, Nagari Tampus Damai Ujung Gading, Nagari Taluak Ambun Ujung Gading, Nagari Koto Gunung Ujung Gading, Nagari Koto Sawah Ujung Gading, Nagari Salido Saroha Ujung Gading, Nagari Kuamang Alai Ujung Gading dan Nagari Situak Ujung Gading.

Pasal 39

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Perangkat Nagari Persiapan Brastagi Ujung Gading, Perangkat Nagari Persiapan Tampus Damai Ujung Gading, Perangkat Nagari Persiapan Taluak Ambun Ujung Gading, Perangkat Nagari Persiapan Koto Gunung Ujung Gading, Perangkat Nagari Persiapan Koto Sawah Ujung Gading, Perangkat Nagari Persiapan Salido Saroha Ujung Gading, Perangkat Nagari Persiapan Kuamang Alai Ujung Gading dan

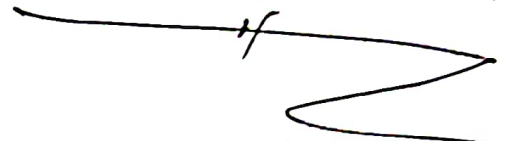
Perangkat Nagari Persiapan Situak Ujung Gading diangkat menjadi Perangkat Nagari Brastagi Ujung Gading, Perangkat Nagari Tampus Damar Ujung Gading, Perangkat Nagari Taluak Ambun Ujung Gading, Perangkat Nagari Koto Gunung Ujung Gading, Perangkat Nagari Koto Sawah Ujung Gading, Perangkat Nagari Salido Saroha Ujung Gading, Perangkat Nagari Kuamang Alai Ujung Gading dan Perangkat Nagari Situak Ujung Gading.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal, 17 Agustus 2022
BUPATI PASAMAN BARAT,



HAMSUARDI

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal, 17 Agustus 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,**



HENDRA PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI
SUMATERA BARAT : (15/15/2020)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BRASTAGI UJUNG GADING,
PEMERINTAHAN NAGARI TAMPUS DAMAI UJUNG GADING, PEMERINTAHAN
NAGARI TALUAK AMBUN UJUNG GADING, PEMERINTAHAN NAGARI KOTO
GUNUNG UJUNG GADING, PEMERINTAHAN NAGARI KOTO SAWAH UJUNG
GADING, PEMERINTAHAN NAGARI SALIDO SAROHA UJUNG GADING,
PEMERINTAHAN NAGARI KUAMANG ALAI UJUNG GADING
DAN PEMERINTAHAN NAGARI SITUAK UJUNG GADING
DI KECAMATAN LEMBAH MELINTANG**

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa serta Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari, Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, asal usul dan/atau hak tradisional dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat minang kabau (adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah) yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehubungan dengan adanya perkembangan dan kemajuan Kabupaten Pasaman Barat pada umumnya dan di Kecamatan pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, di perlukan adanya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa mendatang, Nagari mempunyai peran yang sangat besar dalam menjalankan roda pemerintahan sehingga mampu menjadikan nagari defenitif untuk mengembangkan inovasi, berwawasan kedepan dan siap melakukan perubahan kearah yang lebih baik.

Nagari Defenitif mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Oleh karena itu, dalam Peraturan Daerah ini Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Melakukan Penataan Nagari dengan Membentuk Nagari Baru melalui Pemekaran Nagari.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2
Cukup Jelas
Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26

Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022
NOMOR 6